

BAB IV

SIMPULAN

Penolakan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh satuan kerja dalam proses pelaksanaan anggaran menjadi hal yang penting untuk diketahui sebab penolakan-penolakan tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan *multiplier effect* mulai dari adanya pelaksanaan anggaran yang tidak efektif, keterlambatan penyerapan anggaran atau realisasi belanja negara yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, atau bahkan timbulnya *cost* bagi pemerintah. Selain itu, penolakan SPM menyebabkan adanya komponen penerimaan negara yang juga dapat terlambat masuk ke kas negara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh, dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan penolakan SPM yang diajukan oleh satuan kerja lingkup KPPN Jakarta II. Adapun faktor tersebut, antara lain, sebagai berikut.

1. Kelalaian (*Human Error*) dalam proses penyusunan maupun penyampaian SPM oleh Satuan Kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktelitian dari satuan kerja maupun kurangnya pengetahuan dan pemahaman satker terkait proses bisnis ataupun regulasi yang berlaku.

2. *Judgement* dari petugas KPPN. Adanya perbedaan penilaian atau persepsi petugas KPPN dalam menerima atau menolak SPM yang diajukan.
3. Kendala Sistem Aplikasi. Sistem aplikasi yang digunakan yakni SPAN terkadang mengalami *system error* sehingga menyebabkan ADK yang telah diunggah dalam proses bisnis pencairan dana pada KPPN harus ditolak dan satker perlu mengajukan kembali SPM tersebut.

Ketiga faktor tersebut dapat dimitigasi dengan beberapa cara guna mengurangi jumlah penolakan SPM yang terjadi di KPPN Jakarta II, antara lain dapat berupa membuat *routing slip* berupa daftar rekapitulasi *checklist* kelengkapan dan kebenaran dokumen sebelum diajukan ke KPPN, melaksanakan *double-check* di berbagai tingkat kewenangan pada satker agar menghindari ketidaktepatan dan kekurangan dokumen yang disampaikan ke KPPN, serta senantiasa berkoordinasi dengan KPPN jika terdapat proses bisnis atau regulasi yang kurang jelas dalam penyusunan dan penyampaian SPMnya.

Selain itu, bagi petugas KPPN agar dapat senantiasa menyamakan persepsi dan penilaian dalam proses pengujian SPM dengan cara menjalin dialog terbuka seperti pelaksanaan *Focus Group Discussion* secara rutin serta menerbitkan buku petunjuk digital berisi panduan atau perlakuan khusus untuk kondisi-kondisi tertentu yang diperbarui secara berkala mengikuti kondisi yang dinamis. Untuk faktor kendala sistem aplikasi, hal tersebut terlebih dahulu perlu dilaporkan kondisi permasalahan aplikasi kepada unit yang bertanggung jawab selaku pengembang sistem agar para pengembang sistem dapat mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut.